

**KETIDAKMAMPUAN THAILAND DALAM MENGATASI
PERDAGANGAN SEKS TRANSNASIONAL PADA TAHUN 2016-
2022**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*



Oleh :

**SALSABILA
1810851008**

Dosen Pembimbing:

Zulkifli Harza, S.IP. M.Soc.Sc

Rifki Dermawan, S. Hum., M.Sc

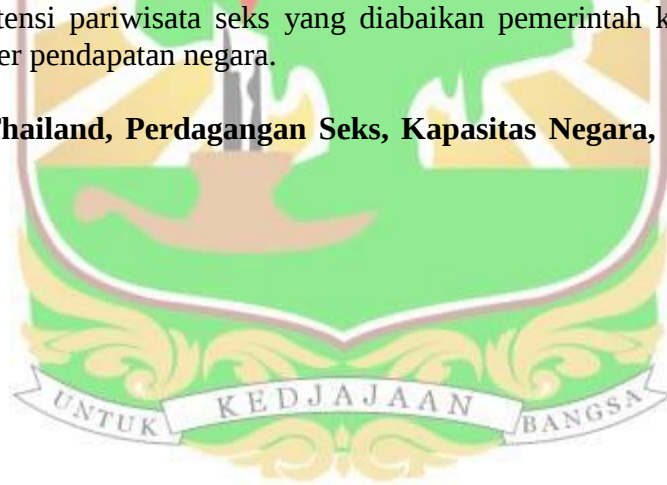
**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi permasalahan perdagangan seks transnasional. Thailand sebagai negara asal dan tujuan telah melakukan berbagai upaya dengan menetapkan berbagai kebijakan di level domestik, menjalin kerja sama bilateral, regional serta kerja sama dengan organisasi internasional. Kendati sudah dilakukan berbagai upaya, jumlah kasus perdagangan seks tidak mengalami perubahan yang signifikan. Penulis menggunakan konsep kapasitas negara oleh Robert G. Blanton, Shannon Lindsey Blanton, dan Dursun dengan menganalisis kapasitas negara berdasarkan dua aspek yang terdiri dari efektivitas birokrasi dan kapasitas fiskal. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi perdagangan seks dikarenakan aspek penting dalam kapasitas negara untuk mengatasi perdagangan seks belum tercapai yang tergambar dalam beberapa hal. Pertama, tingkat korupsi yang tinggi dikalangan pejabat publik seperti polisi, perwira militer, petugas perbatasan dan politisi untuk memperlancar aksi perdagangan seks. Kedua, lemahnya penegakan hukum terkait kasus perdagangan seks akibat pemberian suap terhadap aparat penegak hukum. Ketiga, kelompok kejahatan yang bekerja sama dengan politisi dan pejabat publik lainnya dalam menjalankan aksi perdagangan seks. Keempat, eksistensi pariwisata seks yang diabaikan pemerintah karena merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

Kata Kunci: Thailand, Perdagangan Seks, Kapasitas Negara, Pariwisata Seks, Korupsi



ABSTRACT

This study aims to analyze the causes of Thailand's inability to address the problem of transnational sex trafficking. Thailand as a country of origin and destination has made various efforts by establishing various policies at the domestic level, establishing bilateral, regional and cooperation with international organizations. Despite these efforts, the number of sex trafficking cases has not changed significantly. The author uses the concept of state capacity by Robert G. Blanton, Shannon Lindsey Blanton, and Dursun by analyzing state capacity based on two aspects consisting of bureaucratic effectiveness and fiscal capacity. This research uses a descriptive methodology with a qualitative approach. The results of this research analysis show that Thailand's inability to tackle sex trafficking is due to important aspects of state capacity that have not been achieved which is illustrated in several ways. First, high levels of corruption among public officials such as police, military officers, border officials and politicians to facilitate the sex trade. Second, weak law enforcement related to sex trafficking cases due to bribery of law enforcement officials. Third, criminal groups working with politicians and other public officials in carrying out sex trafficking. Fourth, the existence of sex tourism is ignored by the government because it is one of the sources of state revenue. This is why Thailand is unable to tackle transnational sex trafficking.

Keywords: *Thailand, Sex Trafficking, State Capacity, Sex Tourism, Corruption*

